



ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Asel Rahma Ocsa, Sri Endang Kornita, Wahyu Hamidi

Prodi atau Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pokok masalah yang diteliti yaitu Struktur ekonomi dan Tingkat Disparitas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2019-2023 dan data cross section yang mana mencakup 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis menggunakan Analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klassen digunakan alat bantu Microsoft Excel. Hasil dari penelitian ini Analisis Tipologi Klassen antar kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan Pekanbaru dan Pelalawan termasuk dalam (Kuadran I) sebagai daerah maju dan tumbuh cepat. Kabupaten Siak dan Rokan Hilir berada di (Kuadran II), yaitu daerah maju tapi tertekan. Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kota Dumai masuk (Kuadran III) daerah yang berkembang cepat. Sementara itu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kampar tergolong daerah tertinggal (Kuadran IV). Analisis Indeks Williamson pada tahun 2019-2023 antar kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan ketimpangan pembangunan dalam kategori sedang, dengan rata-rata nilai indeks sebesar 0,523.

Kata Kunci: Disparitas Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi melalui beragam perubahan

dan reformasi. Pembangunan sendiri merupakan proses yang bersifat multidimensional, mencakup perubahan signifikan pada struktur sosial, kebiasaan atau norma, serta lembaga negara, termasuk upaya mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan menekan tingkat kesenjangan (Harahap, 2022).

Disparitas pendapatan merupakan kesenjangan tingkat kemakmuran ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, yang terlihat dari perbedaan pendapatan yang mereka peroleh. Untuk mengurangi tingkat ketimpangan tersebut, diperlukan identifikasi secara tepat terhadap berbagai faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu negara (Perdana Mahadi et al., 2022).

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau, secara administratif provinsi ini terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota yang memiliki karakteristik wilayah masing-masing. Perbedaan tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu, variasi karakteristik seperti letak geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki setiap wilayah turut memberikan dampak besar di Provinsi Riau, sehingga pertumbuhan ekonominya tidak merata dan menimbulkan perbedaan kemampuan dalam berkembang.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, sehingga indikator ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai pembangunan, yang tercermin dari capaian total Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Kuncoro dalam Arif dan Wicaksani (2017), pertumbuhan ekonomi yang pesat berpotensi menimbulkan disparitas pendapatan apabila tidak diiringi pemerataan. Pada tahun 2023, Kota Pekanbaru mencatat PDRB tertinggi sebesar Rp82.235.280, sedangkan PDRB terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp14.067.689. Secara umum, PDRB Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, kecuali pada 2020. Perbedaan nilai PDRB yang cukup signifikan antara daerah tertinggi dan terendah ini dipengaruhi oleh variasi

potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota.

Struktur ekonomi merupakan susunan atau komposisi berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara yang menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2015). Potensi dan pemanfaatan sumber daya berbeda-beda antar wilayah, antar provinsi, bahkan antar daerah dalam satu provinsi. Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Pada tahun 2023, Kabupaten Bengkalis mencatat PDRB tertinggi sebesar Rp133.313, sedangkan PDRB terendah berada di Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp49.985. Perbedaan nilai PDRB tersebut mencerminkan adanya disparitas antar kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting bagi suatu negara. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan pengaruh besar terhadap kondisi perekonomian. Di Provinsi Riau, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa pada periode 2019–2023, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Kota Pekanbaru tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni 1.016.366 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu 211.791 jiwa. Meskipun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menunjukkan tren peningkatan penduduk dari tahun ke tahun.

Perbedaan PDRB, PDRB per kapita, dan jumlah penduduk yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau mengakibatkan pertumbuhan

ekonomi yang tidak merata, sehingga memunculkan disparitas pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai struktur ekonomi melalui klasifikasi daerah serta pengukuran tingkat disparitas pendapatan menggunakan Indeks Williamson di Provinsi Riau. Hasil kajian tersebut dapat menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan di wilayah tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Struktur Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?
2. Bagaimana perkembangan tingkat Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis:

1. Untuk menganalisis Struktur Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
2. Untuk menganalisis perkembangan tingkat Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

TINJAUAN PUSTAKA

Disparitas Pendapatan

Menurut Hakim (2022), Simon Kuznets pada tahun 1955 mengemukakan teori mengenai disparitas pendapatan melalui Hipotesis U Terbalik. Teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, disparitas pendapatan cenderung timpang. Proses ini akan terus berlanjut hingga kesenjangan mencapai titik puncak. Namun, apabila

pembangunan berlanjut dalam jangka panjang, disparitas pendapatan akan berangsur menurun.

Pertumbuhan Ekonomi

Gunnar Myrdal menyoroti adanya proses divergen yang mengakibatkan ketimpangan semakin melebar (unbalanced growth). Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperbesar disparitas pendapatan antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat, terutama apabila tidak disertai kebijakan yang mampu mengarahkan distribusi sumber daya dan peluang secara merata (Harahap, S. H., 2024).

Sementara itu, Todaro dan Smith (2015) menjelaskan bahwa struktur ekonomi adalah susunan kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian yang mengalami pergeseran dari sistem ekonomi tradisional (agraris) menuju ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur dan jasa. Perubahan ini merupakan bagian krusial dalam proses pembangunan ekonomi jangka panjang.

Jumlah Penduduk

Menurut Damanik dan Sidaauruk (2020), penduduk merupakan jumlah individu yang tinggal atau menetap di suatu wilayah pada periode tertentu, yang terbentuk melalui proses demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sementara itu, Teori Malthus menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memperburuk kondisi perekonomian masyarakat, termasuk memperlebar disparitas pendapatan (Harahap, S. H., 2024).

Berdasarkan landasan teori, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat struktur perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi Riau berdasarkan Tipologi Klassen, yang menunjukkan adanya variasi pertumbuhan daerah.

2. Tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dengan Indeks Williamson menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu dan masih berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersifat *cross section* dan *time series* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau selama tahun 2019 sampai 2023 dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Metode ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditas prioritas dan unggulan suatu wilayah. Klasifikasi daerah dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi serta pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita daerah (Kornita S. E., 2023).

Kriteria dalam analisis Tipologi Klassen dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Kuadran I daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau.

2. Kuadran II daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*) wilayah dengan pendapatan per kapita lebih tinggi, namun tingkat

pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau.

3. Kuadran III daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau.

4. Kuadran IV daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau.

Analisis Indeks Wiliamson

Tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau diukur menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini berfungsi untuk mengidentifikasi besarnya ketimpangan pendapatan, yang dihitung melalui kombinasi data pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk di setiap daerah. Indeks ketimpangan regional ini diformulasikan sebagai berikut Menurut Kuncoro (2004) dalam (Sari *et al.*, 2022) :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{y}} \quad 0 < V_w < 1 \quad (2.1)$$

Dimana :

V_w = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

F_i = Jumlah penduduk daerah i

N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Menurut Sjafrizal (2008), Indeks Williamson diartikan bahwa apabila nilai V_w mendekati 1, berarti tingkat ketimpangan sangat tinggi, sedangkan jika mendekati 0, berarti distribusi pendapatan sangat merata. Kriteria sebagai berikut:

1. Nilai Indeks > 1 , terjadi ketimpangan yang sangat tinggi

2. Nilai Indeks $0,7 - 1$, terjadi ketimpangan yang tinggi

3. Nilai Indeks 0,4 – 0,6, terjadi ketimpangan yang sedang

4. Nilai Indeks < 0,3, terjadi ketimpangan yang rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Tabel 1. Hasil Analisis Tipologi Klassen antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023

Laju Pertumbuhan	PDRB Perkapita	
rdi > rni (+)	ydi > yni (+)	ydi < yni (-)
	Daerah maju dan tumbuh cepat (I)	Daerah berkembang cepat tapi tidak maju (III)
	Pelalawan	Kuantan Singingi
	Kota Pekanbaru	Indragiri Hulu
		Indragiri Hilir
		Kota Dumai
		Rokan Hulu
rdi < rni (-)	Daerah maju tapi tertekan (II)	Daerah relatif tertinggal (IV)
	Siak	Kampar
	Rokan Hilir	Bengkalis
		Kepulauan Meranti

Sumber: Data olahan, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa posisi kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam struktur pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh dua indikator utama, yaitu pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita. Tabel ini dibagi menjadi empat kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I , mencakup daerah dengan pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang keduanya lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Pekanbaru dan Pelalawan termasuk dalam kategori “daerah maju dan tumbuh cepat”, yang berarti selain memiliki tingkat kemakmuran ekonomi tinggi, daerah ini

juga mampu mempertahankan laju pertumbuhan yang pesat.

2. Kuadran II, menunjukkan wilayah dengan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata provinsi, namun pertumbuhan PDRB-nya berada di bawah rata-rata provinsi. Siak dan Rokan Hilir masuk kategori “daerah maju tapi tertekan”, di mana tingkat kemakmuran sudah tinggi, tetapi laju pertumbuhan ekonominya cenderung melambat.

3. Kuadran III, mewakili daerah dengan pertumbuhan PDRB di atas rata-rata provinsi, namun PDRB per kapitanya masih lebih rendah dari rata-rata provinsi. Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Dumai termasuk dalam kategori “daerah berkembang cepat tapi belum maju”. Daerah ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik, namun kemakmuran masyarakatnya masih perlu ditingkatkan.

4. Kuadran IV, mencakup wilayah dengan pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang keduanya lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kampar termasuk kategori “daerah relatif tertinggal”, yang menghadapi tantangan berupa pertumbuhan ekonomi lambat dan tingkat kemakmuran rendah, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian Septiani dan Endang (2022), yang menunjukkan bahwa di Jawa Timur distribusi sektor ekonominya cenderung timpang karena didominasi sektor industri dan jasa. Sementara itu, di Provinsi Riau, penyebaran wilayah pada masing-masing kuadran Tipologi Klassen lebih merata dengan sektor unggulan berupa migas dan perkebunan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi regional, di mana Riau bergantung pada sumber daya alam,

sedangkan Jawa Timur bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Oleh karena itu, analisis Tipologi Klassen menjadi instrumen penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang selaras dengan kondisi spesifik tiap daerah.

Tingkat Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Tabel 2. Hasil Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Williamson
2019	0,556
2020	0,511
2021	0,511
2022	0,516
2023	0,522
Rata-rata	0,523

Sumber: Data olahan, 2025.

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Williamson di Provinsi Riau selama periode 2019 hingga 2023 berada pada kisaran 0,511 hingga 0,556. Pada tahun 2019, nilai indeks tercatat sebesar 0,556, kemudian menurun menjadi 0,511 pada tahun 2020 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2021. Selanjutnya, nilai indeks sedikit meningkat menjadi 0,516 pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 0,522 pada tahun 2023. Rata-rata indeks Williamson tahun 2019-2023 yaitu sebesar 0,523. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan, seluruh nilai Indeks Williamson tersebut berada pada kategori ketimpangan sedang (rentang 0,4 – 0,6).

Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau masih tergolong sedang dan cenderung stabil, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pembangunan tidak bisa

diterima secara merata disetiap wilayah atau kabupaten. Pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan ini agar pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh wilayah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Wibowo, (2024) yang menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Indeks Williamson, meskipun Riau tergolong sebagai daerah maju dan tumbuh cepat, tingkat ketimpangan wilayah masih berada pada kategori sedang. Penurunan kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi aktivitas ekonomi, pemerataan alokasi investasi, serta mobilitas faktor produksi antarwilayah. Namun demikian, disparitas antar kabupaten/kota tetap terjadi akibat perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas masing-masing daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyusun kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu Struktur ekonomi di Provinsi Riau menunjukkan variasi kondisi ekonomi antar daerah berdasarkan Tipologi Klassen. Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan (Kuadran I) adalah daerah maju dan tumbuh cepat dengan pertumbuhan dan kemakmuran di atas rata-rata. Kabupaten Siak dan Rokan Hilir (Kuadran II) maju tapi pertumbuhan ekonominya melambat. Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Dumai (Kuadran III) berkembang cepat namun kemakmurannya masih rendah. Sedangkan Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kampar (Kuadran IV) tergolong daerah tertinggal dengan pertumbuhan dan kemakmuran di bawah rata-rata, sehingga perlu perhatian khusus untuk pembangunan yang merata.

Tingkat Disparitas Pendapatan yang diukur menggunakan Indeks

Williamson di Provinsi Riau dari tahun 2019-2023, menunjukkan disparitas pendapatan antar wilayah dalam kategori sedang. Meski ada fluktuasi, disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar daerah masih perlu diperbaiki untuk mencapai pemerataan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya. University Research Colloquium (URECOL), hlm. 323-328.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2023). <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3//produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-hargakonstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-riau--ribu-rupiah--2023.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2024) <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzljMg/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2025). <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-riau--2017.html>.
- Damanik, E., dan Sidauruk, P. (2020). Analisis Dinamika Kependudukan dan Implikasinya terhadap Pembangunan Daerah. Jurnal Demografi Indonesia, 15(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jdi.v15i1.2020>.
- Hakim, R. (2022). *Teori Kuznets dan Ketimpangan Ekonomi: Evaluasi Hipotesis U Terbalik di Negara Berkembang*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(2), 89-101. <https://doi.org/10.5678/jep.v18i2.2022>.
- Harahap, S. H. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(3), 1503-1512. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/52321/328>.
- Harahap, S. H., Ariasta, M. A., dan Setiawati, R. I. S. (2024). Dampak Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Jawa Timur. Jurnal SamudraEkonomidanBisnis, 15(3), 697-713. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i3.10361>.
- Kornita, S. E. (2023). Ekonomi Regional. Padang: CV HEI Publishing Indonesia.
- Kuznet, S. (1955). Growth and Income Inequality. The American Economic Review. Google Scholar.
- Safitri, R., dan Wibowo, A. (2024). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di Provinsi Riau. Jurnal Ambitek, 1(1), 1-14. <https://jurnalambitek.stie-mahaputra.riau.ac.id/ojs/index.php/ambitek/article/view/8>.
- Sari, R. P., Nugroho, D. A., & Wulandari, S. (2022). *Pengukuran Ketimpangan Regional Menggunakan Indeks Williamson dan Gini Ratio di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, <https://doi.org/10.5678/jep.v20i2.2022>.
- Septiani, I. Y., & Endang. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020: Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial (JEMeS), 5(1), 25-38. <https://doi.org/10.56071/jemes.v5i1.292>.
- Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduouse Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Pearson Education.
- Perdana Mahadi, Z., Syariuddin, A., dan Nuryadin, D. (2022). Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan Di Jawa Barat (2011-2020): Pendekatan Panel Spasial. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(10), 2039-2056. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.300>.